

PERAN KANTOR KEIMIGRASIAN KELAS I SURAKARTA

(Studi Kasus Pengawasan Dan Penindakan Izin Tinggal Mahasiswa Asing Di

Universitas Muhammadiyah Surakarta)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I

Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

Anugrah Kurnia Wulandari

C.100.120.199

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN KANTOR KEIMIGRASIAN KELAS I SURAKARTA

**(Studi Kasus Pengawasan Dan Penindakan Izin Tinggal Mahasiswa Asing Di
Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh:

Anugrah Kurnia Wulandari
C100120199

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuria', written over a horizontal line.

(Dr.Nuria Siswi Enggarani,S.H.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN KANTOR KEIMIGRASIAN KELAS I SURAKARTA
(Studi Kasus Pengawasan Dan Penindakan Izin Tinggal Mahasiswa Asing Di
Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Yang ditulis oleh:

Anugrah Kurnia Wulandari
C100120199

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari Rabu, Tanggal 11 April 2018


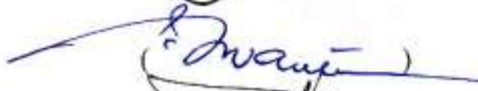

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Dr.Nuria Siswi Enggarani,S.H.,M.Hum

Sekretaris : Iswanto, S.H., M.H

Anggota : Jaka Susila, S.H., M.Si, M.H


()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)

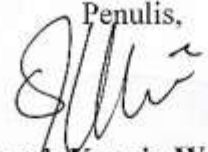
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 09 April 2018

Penulis,



Anugrah Kurnia Wulandari

C100120199

PERAN KANTOR KEIMIGRASIAN KELAS I SURAKARTA
(Studi Kasus Pengawasan Dan Penindakan Izin Tinggal Mahasiswa Asing Di
Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran Kantor Keimigrasian Kelas I Surakarta terhadap Izin Tinggal Mahasiswa Asing di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk mengetahui Bagaimana Penindakan Kantor Keimigrasian Kelas I Surakarta terhadap Izin Tinggal Mahasiswa Asing yang melebihi batas waktu tinggal (*Overstay*) di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat Normatif- Empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung dilapangan. Teknik pengumpulan data dengan cara yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara secara langsung terhadap narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Kata kunci : Izin Tinggal Orang Asing, Penindakan, Keimigrasian

Abstract

This research is doing the purpose to know the function matter pertaining to immigration office first class 1 Surakarta about foreign student permission stay in Muhammadiyah University Of Surakarta. To know how taking measures matter pertaining of immigration office first class of surakarta about foreign student permission stay who has been overday in Muhammadiyah University of Surakarta. This research used normative empiris methode. Technique of removal data is doing by enter the field directly. Technique of removal data by seen the library study and interview directly with the source who has relation with the problem which discussed.

Keyword : Foreign people permission stay, taking measures, matters pertaining of immigration.

1. PENDAHULUAN

Ribuan pulau di Indonesia yang tersebar dalam pulau-pulau besar maupun kecil menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia yang terkenal dengan keberagaman budaya dan negara yang kaya akan potensi sumber daya alam menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi mancanegara.

Hal ini telah menimbulkan berbagai permasalahan di berbagai negara termasuk Indonesia yang letak geografisnya sangat strategis, yang pada gilirannya berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia serta bidang tugas keimigrasian. Dalam operasional di lapangan ditemukan beberapa permasalahan menyangkut orang asing yang memerlukan penanganan lebih

lanjut. Lingkungan strategis global maupun domestik berkembang demikian cepat, sehingga menuntut semua perangkat birokrasi pemerintahan, termasuk keimigrasian di Indonesia untuk cepat tanggap dan responsif terhadap dinamika tersebut.¹ Terlihat jelas bahwa peran imigrasi sangatlah penting terhadap arus lalu lintas bagi warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang keluar masuk wilayah Indonesia yang berarti terciptanya hubungan bilateral antar negara.

Untuk itu diperlukan sebuah aturan tentang lalu lintas Negara yang disebut keimigrasian agar menjaga ketertiban dan keamanan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya aturan Keimigrasian yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ini diharapkan sesuai dengan perkembangan kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia, kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait, serta bersifat antisipatif terhadap permasalahan di masa depan.²

Namun Pelanggaran dan kejahatan keimigrasian akan timbul dengan datangnya orang asing di wilayah Indonesia. Di Kota Surakarta, Pelanggaran yang dilakukan orang asing berupa melebihi batas waktu izin tinggal *overstay* adalah salah satu pelanggaran yang sering dilakukan. Orang asing yang tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian. Menyikapi akan hal tersebut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing akan diambil tindakan tegas. Tindakan keimigrasian yang dikenakan dapat berupa deportasi sebagai salah satu tindakan khusus dan khas dari fungsi keimigrasian. Proses penegakan hukum keimigrasian tersebut, sangat penting dilakukan oleh keimigrasian karena merupakan penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. Untuk itu perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif, sehingga tidak lagi digantungkan

¹ Imigrasi.go.id, Selasa, 14 November 2017, 18.07 WIB : *Sejarah singkat Imigrasi*, dalam <https://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah>.

² Penjelasan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

pada penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan sistem atau peraturan perundangundangan dengan memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien.

Karena kemungkinan terjadinya pelanggaran Imigrasi semakin besar seperti *overstay*, sehingga dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya keimigrasian membutuhkan peran dari masyarakat sebagai informan penting bagi kelancaran dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Demikian uraian singkat latar belakang penelitian ini.

2. METODE

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui dua cara yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Pada tahap awal, disamping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari dan memperoleh data-data berupa keterangan dan informasi serta fakta-fakta dari responden baik lisan maupun tertulis dikumpulkan, diidentifikasi dan dikategorikan, selanjutnya dicari hubungannya dengan peraturan hukum yang ada kemudian disusun secara sistematis, logis dan yuridis. Kemudian, Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan narasumber guna memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian baik dilakukan secara lisan maupun tertulis.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisa dengan menggunakan Metode Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan, ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan

³Khuzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 3.

berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Kantor Keimigrasian Kelas I Surakarta terhadap Izin Tinggal Mahasiswa Asing di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dalam penelitian skripsi ini penulis mencoba menginventarisasi peraturan yang berkaitan dengan peran Keimigrasian terhadap izin tinggal mahasiswa asing di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Peran Kantor Keimigrasian Kelas I Surakarta memiliki 2 (dua) peranan penting dalam memberikan pelayanan keimigrasian, yaitu : (1) Peran dalam pemberian Izin Tinggal warga negara asing yang akan memasuki wilayah Indonesia. Peran penting Kantor Keimigrasian Kelas I Surakarta dalam pemberian Izin Tinggal bagi warga negara asing atau calon mahasiswa asing yang akan memasuki wilayah Indonesia adalah pemberian Izin Tinggal. Pemberian Izin Tinggal, merupakan salah satu bentuk Pelayanan Publik dalam bidang Administrasi yang dilakukan oleh Kantor Keimigrasian Kelas I Surakarta. Bentuk pelayanan publik administrasi oleh Kantor Keimigrasian ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Tentunya dalam memberikan pelayanan publik, Kantor Keimigrasian Kelas I Surakarta memberikan pelayanan berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Pasal 1 UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁴ Pelayanan publik kepada warga negara asing yang akan menempuh pendidikan di Indonesia berupa pelayanan keimigrasian yaitu pemberian izin tinggal.

⁴ Pasal 1 Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pemberian izin tinggal tersebut berupa visa tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas bagi mahasiswa asing yang akan menempuh pendidikan di Indonesia. Warga negara asing yang akan memasuki wilayah Indonesia dalam rangka menempuh pendidikan (Pelajar) harus menggunakan visa tinggal terbatas sesuai dengan tujuan kedatangannya di Indonesia. Hal tersebut tersurat didalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Pasal 39 huruf a dan didalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 102 ayat (1), Pasal 102 ayat (3), Pasal 103 ayat (1).

Untuk memberikan visa tinggal terbatas kepada orang asing, terlebih dahulu mahasiswa asing tersebut harus memenuhi beberapa syarat diantaranya memiliki surat permohonan dan penjaminan, fotokopi paspor untuk minimal 18 bulan untuk 1 tahun masa tinggal atau 30 bulan untuk 2 tahun masa tinggal, fotokopi buku tabungan, dan yang terpenting rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Visa Tinggal Terbatas untuk pendidikan (Pelajar) masuk dalam kategori Indeks 316. Jenis visa tinggal terbatas terbagi menjadi beberapa indeks yang setiap indeks memiliki persyaratan yang berbeda dan kegunaan yang berbeda. Namun bagi warga negara asing yang akan menempuh pendidikan di Indonesia harus menggunakan Indeks 316. Untuk memperoleh Visa Tinggal Terbatas, Orang Asing dapat mengajukan permohonannya ke Kantor Perwakilan Republik Indonesia terdekat yang berada di negara asal pemohon, atau Penjaminnya dapat mengajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Setelah melengkapi semua persyaratan dan pengajuan sesuai dengan prosedur, kemudian berkas pengajuan di periksa oleh Pejabat imigrasi yang bertugas memeriksa persyaratan permohonan untuk disampaikan hasil pemeriksaan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk memperoleh persetujuan.

Untuk penerbitan Visa Tinggal Terbatas tersurat dalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013 Pasal 104, kemudian permohonan visa juga dapat ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 109.

Secara umum dalam pemberian pelayanan publik oleh Keimigrasian berupa Visa Tinggal Terbatas ini harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, apabila dalam pengajuan permohonan Visa Tinggal Terbatas tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Keimigrasian berhak menolak memberikan Visa Tinggal Terbatas.

Kemudian peran Kantor Keimigrasian yang ke (2) yaitu pemberian Izin Tinggal. Setelah diberikannya Visa Tinggal Terbatas (VITAS) barulah Keimigrasian dapat memberikan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), namun dalam pemberian ITAS sama halnya dengan prosedur dalam pemberian VITAS harus berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Agar warga negara asing dapat menempuh pendidikan di Indonesia yaitu dengan memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS).

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pasal 141 ayat (1) dan ayat (2).

Permohonan Izin Tinggal Terbatas bagi warga negara asing yang akan mengikuti pendidikan di Indonesia diajukan oleh Orang Asing atau Penjaminnya kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang mengajukan.

Untuk pengajuan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) tersurat dalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013 Pasal 142 ayat (1), Pasal 142 huruf e, dan Pasal 143.

Adapun prosedur pengajuan Izin Tinggal Terbatas yaitu dengan cara *pertama*, Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, memasukkan data, indentifikasi, verifikasi data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan. *Kedua*, melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. *Ketiga*, mendapat persetujuan Kepala Kantor Imigrasi

atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. *Keempat*, sesi wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari. *Kelima*, Penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas yang Penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali pada paspor Kebangsaan. Kemudian Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dan Pemindahan Dokumen Selesai dan Penyerahan Dokumen dalam jangka waktu 4 hari kerja.

Pendaftaran Izin Tinggal Terbatas juga dapat dilakukan secara *Online*. Dilakukan Setelah warga negara asing tersebut datang ke Indonesia, dengan cara melapor ke kantor imigrasi di wilayah yang dituju misalnya Surakarta jika akan menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta, harus dalam jangka waktu 30 hari terhitung setelah datang ke Indonesia. Warga negara asing yang melakukan pengajuan Izin Tinggal Terbatas dengan melengkapi persyaratan, memasukkan data, indentifikasi, verifikasi data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan. Setelah tahap ini dilakukan, warga negara asing wajib membayar biaya Izin Tinggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Peran Keimigrasian sangat penting bagi mahasiswa asing yang akan menempuh pendidikan di Indonesia. Pemberian Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dan Izin Tinggal Terbatas (KITAS) menjadi gerbang utama bagi mahasiswa asing yang akan menempuh pendidikan di Indonesia. Mengingat pendidikan adalah kunci sukses suatu bangsa dalam pembangunan. Maka dari itu peran Keimigrasian sangat membantu mahasiswa asing yang akan menempuh pendidikan di Indonesia.

3.2 Pengawasan Kantor Keimigrasian Kelas I Surakarta Terhadap Izin Tinggal Mahasiswa Asing yang melebihi batas waktu tinggal (*Overstay*) di Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pengawasan dan Penindakan di Kantor Keimigrasian Kelas I Surakarta dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Penindakan. Dalam menjalankan tugasnya Seksi Pengawasan dan Penindakan melakukan Pengawasan yang dimulai sejak warga negara asing tersebut mengajukan

permohonan Visa Tinggal Terbatas (VITAS) hingga berada dan melakukan kegiatan apapun di wilayah negara Republik Indonesia. Tata Cara Pengawasan Keimigrasian Pengawasan terhadap warga negara asing tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.

Tentang tata cara pengawasan tersurat dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 2, Pasal 34 ayat (1), Pasal 36, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 60, dan Pasal 61.

Pengawasan administratif yang dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti dokumen warga negara asing secara manual dapat dilakukan dengan cara yaitu : (1) Pengawasan melalui Pelayanan Keimigrasian dengan Visa, dimulai dari memeriksa kelengkapan, keabsahan dan verifikasi berkas permohonan. Melakukan wawancara terhadap kelayakan pemohon untuk dapat diberikan Visa, dan memeriksa daftar Pencegahan dan Penangkalan. (2) Pengawasan melalui Pelayanan Keimigrasian Izin Tinggal dimulai dari memeriksa kelengkapan persyaratan, keabsahan dan verifikasi berkas permohonan, wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari dan memeriksa daftar Pencegahan dan Penangkalan warga negara asing tersebut. (3) Pengawasan melalui Pelayanan Keimigrasian dengan Status Keimigrasian dimulai dari memeriksa kelengkapan persyaratan, keabsahan dan verifikasi berkas permohonan, wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari dan memeriksa daftar Pencegahan dan Penangkalan. Sehingga dapat diketahui apakah warga negara asing tersebut melakukan pelanggaran atau tidak melalui pengawasan administratif.

Pengawasan yang dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Pengecekan melalui SIMKIM dilakukan dengan cara memasukkan nomor Passpor warga negara asing ke dalam Aplikasi SIMKIM.

Dalam tahun 2017, ada 3 Mahasiswa asing Universitas Muhammadiyah Surakarta yang melakukan pelanggaran *overstay*, yaitu : (1) Azzezah Karee, (2) Haris Hayima, (3) Nurhanan Baikadem, Seksi

Pengawasan dan Penindakan berhasil mengetahui pelanggaran tersebut dari hasil pengawasan keimigrasian melalui aplikasi SIMKIM. Karena melakukan pelanggaran ketentuan undang-undang maka ketiga mahasiswa asing asal thailand tersebut dikenakan sanksi administratif keimigrasian.

Kantor Keimigrasian Kelas I Surakarta memiliki *Standart Operational Prosedure (SOP)* yang harus dipenuhi, apabila SOP tersebut tidak dilaksanakan maka proses pengawasan keimigrasian akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil, ketepatan waktu, dan akurasi data.

Demikian uraian singkat tentang pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Keimigrasian Kelas I Surakarta, bahwa pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian, *Standart Operational Prosedure (SOP)* menjadi acuan penyelenggaraan pengawasan keimigrasian. Bagi warga negara asing yang melanggar ketentuan Undang-Undang Keimigrasian akan diberikan sanksi atau masuk dalam daftar pengkalan keimigrasian. Kantor Keimigrasian membutuhkan peran semua kalangan masyarakat sebagai Informa penting dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian.

3.3 Penindakan Kantor Keimigrasian Kelas I Surakarta Terhadap Izin Tinggal Mahasiswa Asing yang melebihi batas waktu tinggal (*Overstay*) di Universitas Muhammadiyah Surakarta

Penindakan keimigrasian merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak keimigrasian setelah melakukan pengawasan terhadap warga negara asing. Dari hasil pengawasan Keimigrasian di Tahun 2017, ada 16 Orang warga negara asing yang di Kota Surakarta yang melakukan pelanggaran keimigrasian. 3 (tiga) diantaranya adalah mahasiswa asing yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pelanggaran ketiga mahasiswa asing tersebut tersurat dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 75 ayat (1), ketiga mahasiswa asal Thailand tersebut tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang ada maka harus dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian.

Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.⁵ Namun, untuk dikenakan tindakan keimigrasian karena dianggap telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada, maka dalam setiap bentuk Keputusan Tindakan Keimigrasian harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas. seperti ketiga mahasiswa asing asal Thailand tersebut yang melebihi waktu Izin Tinggal (*Overstay*) yang ditetapkan oleh Keimigrasian. Seharusnya ketiga mahasiswa tersebut melakukan perpanjangan Visa Tinggal Terbatas (VITAS) maupun Izin Tinggal Terbatas di Kantor Keimigrasian jika telah jatuh tempo waktu pemakaian visa dan izin tinggal terbatas mereka.

Namun mereka tidak menaati peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga Kantor Keimigrasian harus mengambil Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportase sesuai dengan prosedur.

Tindakan Administratif Keimigrasian diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 75.

Pemberian Tindakan Administif oleh Kantor Keimigrasian Kelas I Surakarta ini dilaksanakan oleh sesi Pengawasan dan Penindakan. Karena alasan pelanggaran *Overstay*, tidak menaati ketentuan yang ada. Seharusnya apabila jangka waktu pemakaian Izin Tinggal Terbatas telah habis, maka ketiga mahasiswa asing tersebut harus segera melaporkan dan melakukan perpanjangan Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas di Kantor Keimigrasian Surakarta.

Namun apabila warga negara asing tidak memperpanjang Izin Tinggal Terbatas maka secara tidak langsung warga negara asing dianggap melakukan pelanggaran *Overstay* dan harus bertanggungjawabkan perbuatannya. Ketiga mahasiswa asing asal Thailand tersebut di *Deportase* atau dipulangkan ke negara asalnya.

Pemulangan ketiga Mahasiswa Asing tersebut pada Tanggal 11-Januari-2017, Pendeportasean ini didampingi oleh Petugas Keimigrasian yang ditunjuk oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia didampingi dari

⁵ Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No.6 Tahun 2011

Bandara Adi Soemarmo (Boyolali), sampai ke Bandara Don Mueang (Thailand). Setelah sampai di bandara Thailand seluruh Dokumen Perjalanan diambil/ dilakukan penarikan oleh Petugas Keimigrasian.

Dalam melaksanakan Seksi Pengawasan Dan Penindakan Kantor Keimigrasian Kelas I Surakarta kekurangan Personel dalam melaksanakan tugas. Petugas merasa memerlukan personel tambahan untuk melakukan pengawasan di 7 daerah Kota/Kabupaten yang masuk dalam lingkup Tanggungjawab Keimigrasian Kelas I Surakarta.

Seksi pengawasan dan penindakan berharap untuk tahun 2018 ada penambahan personil mengingat dari tahun ke tahun pelanggaran yang dilakukan oleh Orang Asing terus meningkat, dan juga Seksi Pengawasan Dan Penindakan berharap masyarakat ikut berperan aktif dalam menyampaikan Informasi tentang Keberadaan, atau Kegiatan Orang Asing di Kota Surakarta dan sekitarnya kepada Kantor Keimigrasian Kelas I Surakarta .

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang judul di atas maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, Kantor Keimigrasian Kelas I Surakarta memiliki Peran penting Pelayanan Publik yaitu dalam Pemberian Izin Tinggal mahasiswa asing yang akan memasuki wilayah Indonesia. Ada 2 (dua) syarat bagi Mahasiswa Asing yang akan menempuh Pendidikan di Indonesia yaitu harus memiliki Visa Tinggal Terbatas (VITAS), dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS). Namun jika ingin mendapatkan Izin Tinggal Terbatas, maka Mahasiswa Asing tersebut harus memiliki Visa Tinggal Terbatas terlebih dahulu dengan cara mengajukan permohonan pembuatan Visa Tinggal Terbatas(VITAS) sesuai dengan prosedur dan ketentuan Keimigrasian.

Kedua, Pengawasan Keimigrasian oleh Kantor Keimigrasian Kelas I Surakarta ini dilakukan oleh seksi Pengawasan dan Penindakan, untuk melakukan Pengawasan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Pengawasan terhadap warga negara asing tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pengawasan administratif yang dilakukan melalui pemeriksaan Dokumen Keimigrasian dan melalui Aplikasi SIMKIM Keimigrasian, untuk pengawasan lapangan yang dilakukan oleh Kantor Keimigrasian Kelas I Surakarta. Pengawasan terhadap Izin Tinggal Mahasiswa Asing dilakukan semenjak pengajuan permohonan pembuatan Visa hingga berada dan berkegiatan di Indonesia sesuai dengan prosedur pengawasan.

Ketiga, Penindakan keimigrasian merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak keimigrasian setelah melakukan pengawasan terhadap warga negara asing. Penindakan Keimigrasian tersebut berupa Tindakan Administratif Keimigrasian seperti : Sanksi Tertulis sebagai peringatan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas, Pemberian Sanksi berupa denda *Overstay*, Keharusan berada di Rumah Detensi Imigrasi, Pencegahan, Penangkalan, Deportase. hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Narasumber.

4.2 Saran

Pertama, Diharapkan untuk kedepannya lebih sering mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan agar semua kalangan mengetahui dan ikut serta dalam membantu menegakkan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Khususnya di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang memiliki program Internasional bagi Mahasiswa Asing.

Kedua, Diharapkan agar Kantor Keimigrasian menambah personel bagi sesi Pengawasan dan Penindakan agar dapat menjalankan tugas dengan maksimal tanpa terkendala minimnya personil agar dapat memenuhi kebutuhan 7 (Tujuh) Kota/ Kabupaten yang masuk dalam wilayah Kerja Kantor Keimigrasian Kelas I Surakarta.

Ketiga, Diharapkan untuk meningkatkan pelayanan di bidang Keimigrasian sesuai dengan perubahan-perubahan zaman yang terus

berkembang, meningkatkan pelayanan dan sumber daya manusia dari personil Keimigrasian serta peningkatan dalam bidang teknologi agar lebih memudahkan kinerja Keimigrasian di era yang akan datang.

4.3 Persantunan

Pertama, saya mengucapkan terimakasih kepada orangtua penulis yang telah memberikan doa, restu dan petunjuk hidup. *Kedua*, kepada pembimbing sekaligus penguji dalam menyelesaikan penelitian ini. *Ketiga*, kepada semua Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Keempat*, kepada semua narasumber dan pihak yang telah banyak membantu memberikan izin riset dan wawancara guna terselesainya penelitian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Khuzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 3.

Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Website:

Imigrasi.go.id, Selasa, 14 November 2017, 18.07 WIB : *Sejarah singkat Imigrasi*, dalam <https://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah>.